

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN PERATURAN KEMENTERIAN SOSIAL NO.1 TAHUN 2018

(Studi Kasus di Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta)

Anastasia Sophie Ayu Wulandari

NIM : 202114033

Universitas Sanata Dharma

2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan. Prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan dilihat berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018. Adanya penelitian ini, diharapkan mampu menjadi referensi dan memberi saran masukan kepada pemerintah selaku pihak pengelola dana bantuan maupun kepada para pendamping PKH dengan harapan dapat terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih bertanggung jawab dan terbuka.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif. Subjek dalam penelitian yaitu koordinator PKH Kota Yogyakarta, pendamping sosial PKH Kemantren Tegalrejo, dan masyarakat penerima bantuan PKH Kemantren Tegalrejo. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis untuk kualitatif dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan PKH Kemantren Tegalrejo telah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018. Hal ini ditunjukkan dari dilaksanakannya pengelolaan PKH seperti pada perencanaan, validasi data calon penerima bantuan, penetapan penerima bantuan, penyaluran bantuan, pendampingan, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, verifikasi komitmen penerima bantuan, pemutakhiran data, serta transformasi kepesertaan sudah berjalan sesuai dengan isi Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018.

Kata Kunci : Program Keluarga Harapan, Akuntabilitas, Transparansi

ABSTRACT

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF ACCOUNTABILITY AND
TRANSPARENCY IN THE MANAGEMENT OF SOCIAL ASSISTANCE
PROGRAM KELUARGA HARAPAN BASED ON THE MINISTRY OF
SOCIAL AFFAIRS REGULATION NO. 1 OF 2018**
(Case Study in Kemantren Tegalrejo, Yogyakarta City,
Special Region of Yogyakarta)

Anastasia Sophie Ayu Wulandari
NIM : 202114033
Sanata Dharma University
2024

This study aims to determine the application of the principles of accountability and transparency in the management of the Program Keluarga Harapan. The principles of accountability and transparency applied are seen based on the Minister of Social Affairs Regulation No. 1 of 2018. The existence of this research is expected to be able to become a reference and provide input to the government as the manager of aid funds and to PKH assistants in the hope of continuing to improve services to the community more responsibly and openly.

The research design used is a case study using qualitative research methods with a comparative descriptive approach. The subjects in the study were the PKH coordinator of Yogyakarta City, PKH social assistant Kemantren Tegalrejo, and the community receiving PKH assistance Kemantren Tegalrejo. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is a qualitative analysis technique with data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of this study indicate that the application of the principles of accountability and transparency in the management of PKH Kemantren Tegalrejo is in accordance with the Minister of Social Affairs Regulation No. 1 of 2018. This is shown from the implementation of PKH management such as planning, validating data on prospective beneficiaries, determining beneficiaries, distributing assistance, mentoring, family capacity building meetings, verifying the commitment of beneficiaries, updating data, and transforming membership in accordance with the contents of the Minister of Social Affairs Regulation No. 1 of 2018.

Keywords: Family Hope Program, Accountability, Transparency